

2015

Pertemuan NGO/CSO Indonesia untuk Mendorong Implementasi Sustainable Energy for All (SE4ALL) Laporan Workshop



Institute for Essential Services Reform (IESR)

Bumbu Desa Cikini, Jakarta

9/7/2015



Pengantar

Pada tahun 2011, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan sebuah inisiatif baru bernama Energi Berkelanjutan untuk Semua (Sustainable Energy for All). Inisiatif ini diluncurkan untuk memacu pertumbuhan akses energi bagi 1,1 miliar orang yang tidak punya akses terhadap energi. SE4ALL memiliki tiga tujuan utama: (1) Peningkatan akses energi; (2) Penggandaan laju pengembangan energi terbarukan, dan (3) Penggandaan laju efisiensi energi, hingga 2030.

Di Indonesia, lebih dari 80 juta hidup tanpa listrik dan belum menikmati akses terhadap energi. Rasio elektrifikasi di Indonesia berkisar dari 22% di Papua dan 86% untuk Bali (USAID, 2008), dengan jutaan keluarga mengandalkan minyak tanah untuk penerangan. Sekitar 82% penduduk pedesaan menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar memasak utama mereka (GACC, 2011), dan hampir 100 juta orang mengandalkan tungku tradisional. Kemiskinan energi ini sangat mempengaruhi masyarakat di daerah terpencil, khususnya perempuan, karena mereka memikul tanggung jawab utama untuk kegiatan rumah tangga seperti memasak, membersihkan, menyediakan air dan merawat anak-anak.

Saat ini SE4ALL masih tetap berjalan di tingkat internasional dan target-targetnya telah diakomodasi dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Namun di Indonesia, inisiatif SE4ALL mengalami 'tidur' karena berbagai alasan. Di tengah berhentinya proses pembahasan SE4ALL, Kopernik beserta IESR dan HIVOS merasa perlunya untuk mendorong kembali implementasi SE4ALL di Indonesia. Konteks inisiatif SE4ALL di Indonesia dirasakan sangat relevan dengan adanya target pemerintah saat ini untuk meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 86% pada tahun 2019 dan 100% sebelum 2025, serta peningkatan bauran energi terbarukan menjadi 10% pada tahun 2019, serta adanya wacana dari Menteri ESDM untuk mengakselerasinya menjadi 15% pada 2019/2020.

Implementasi SE4ALL membutuhkan peran aktif organisasi masyarakat sipil (NGO/CSO) yang merupakan salah satu aktor utama dalam SE4ALL selain pemerintah dan sektor swasta. Peran aktif NGO/CSO juga memiliki arti strategis yaitu mengarahkan dan mendorong masuknya agenda-agenda kelompok masyarakat sipil dalam rencana implementasi SE4ALL, termasuk perspektif gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui akses energi.

Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2015 bertempat di Bumbu Desa, Jakarta, dihadiri oleh 11 organisasi yaitu: Kopernik, IESR, HIVOS, Yayasan Rumah Energi, Yayasan Pelangi, Mercy Corps Indonesia, PEKKA, WRI, IBEKA, Greenpeace, dan Yayasan Wadah.

1. Perkembangan *Sustainable Energy for All* di Indonesia

Energi pada dasarnya merupakan prasarana untuk mendukung aktivitas pembangunan (perekonomian, akses pada air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, pemerataan kesempatan). Pada saat Millennium Development Goals (MDGs) disahkan di tahun 2000, energi memang tidak masuk dalam salah satu target. Padahal, apabila tidak ada energi, maka akses pada gizi tidak akan dapat terpenuhi. Begitu juga dengan masyarakat yang tinggal di pedalaman, akan sulit bagi mereka untuk mengambil air dari sungai dimana mereka memerlukan energi untuk memompakan air dari sumbernya. Hal yang sama berlaku untuk layanan kesehatan, dimana kita menemukan banyak fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpelosok, tapi tidak ada lemari pendingin untuk menyimpan vaksin. Dengan kondisi seperti di atas, masyarakat tetap harus pergi ke kota terdekat untuk dapat menikmati fasilitas-fasilitas tersebut. Sustainable Development Goal, yang akan disepakati di New York di akhir September 2015 mendatang, telah memasukan energi sebagai goal yang ke-7, dimana 3 goal SEFA termasuk dalam indikator keberhasilannya.



Gambar 1 Peran energi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan

Akses energi mencakup 2 hal: akses listrik yang lebih modern dan akses energi untuk memasak. Untuk dapat memenuhi akses keduanya, diperlukan tahapan-tahapan. Misalnya, untuk listrik; yang biasanya dilakukan adalah memberikan lampu terlebih dahulu untuk memberikan penerangan. Namun, lampu saja tidak cukup. Idealnya, masyarakat memerlukan pasokan listrik yang cukup, sehingga bisa melakukan aktivitas lainnya. Itu sebabnya, pemenuhan akses pada listrik yang diinginkan sebenarnya tidak hanya berhenti di sini, namun juga sampai memberikan listrik yang cukup agar masyarakat dapat melakukan kegiatan lainnya.

Untuk memenuhi akses bahan bakar untuk memasak, dimulai dengan menggunakan bahan bakar padat secara terbuka atau dengan tungku 3 batu. Karena kebiasaan masyarakat untuk memasak dengan tungku, maka sekarang ini banyak program *improved cook-stoves* yang dilakukan, sehingga memasak jadi lebih cepat, lebih hemat, dan lebih sehat.

Isu kesehatan juga menjadi masalah yang cukup pelik dalam penggunaan tungku. Akibat ventilasi yang kurang memadai, maka memasak dengan menggunakan metode ini, kerap kali membunuh perempuan dan anak-anak yang berada di rumah atau yang memasak¹.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan mengganti teknologi yang sederhana (tungku tiga batu) dengan teknologi yang lebih baik untuk mengurangi asap dari polutan serta resiko pencemaran dalam rumah, menjadi salah satu kunci dalam penyediaan energi untuk memasak. Namun demikian, hendaknya peningkatan akses energi untuk memasak tidak berhenti disitu; intervensi harus berlanjut ke arah penyediaan bahan bakar yang non-padat.



Gambar 2 Tahapan peningkatan akses energi

Hampir seluruh daerah di Indonesia belum memiliki listrik, bahkan Jakarta, yang rasio elektrifikasinya hanya mencapai 99.9%. Di wilayah Timur Indonesia, masih banyak orang yang belum memiliki akses pada listrik, hingga saat ini, sekitar 45-50 juta orang hidup tanpa listrik.

¹ Pada umumnya, untuk anak-anak balita, ibu biasanya memasak sambil menggendong anaknya. Itu sebabnya, banyak kasus *indoor air pollution* yang juga dialami oleh balita.

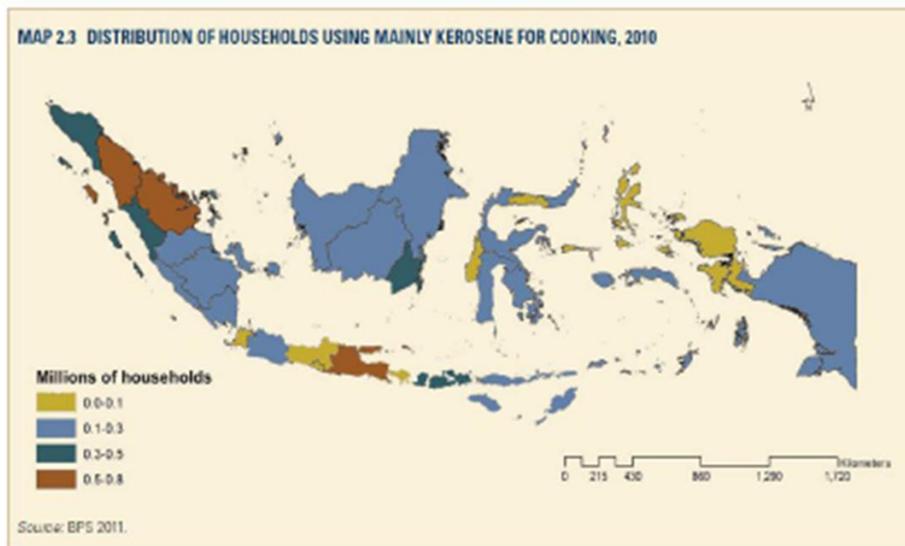
Rasio Elektrifikasi 2013



Gambar 3 Pemetaan rasio elektrifikasi Indonesia tahun 2013²

Data Bank Dunia di tahun 2010 menyatakan bahwa diperkirakan di Indonesia sudah 103 juta orang yang masih memasak dengan bahan bakar kayu, yang artinya ada sekitar 40% lebih rakyat Indonesia yang masih bergantung pada kayu. Hal ini menyebabkan program untuk penggantian kerosene dengan LPG, penyaluran LPG itu lebih digalakkan. Di Jawa itu cukup banyak yang menggunakan LPG. Tapi di luar Jawa itu hampir tidak ada. Kecenderungan orang yang menggunakan LPG itu akan ditentukan oleh ketersediaan LPG, atau kalau harga LPG murah, maka LPG akan menjadi pilihan. Namun, jika harga LPG-nya itu mahal, maka masyarakat akan kembali menggunakan kayu bakar. Dulu ketika minyak tanah masih ada, masyarakat akan berpaling ke minyak tanah. Tapi karena minyak tanah sudah tidak lagi dijual, masyarakat akan berpaling ke kayu bakar. Kenyataan lainnya adalah pasokan LPG tidak selalu konstan, dan harganya di desa akan menjadi sangat tinggi, dikarenakan oleh biaya transportasi.

² Sumber: <http://assets.kompasiana.com/statics/files/14193951241848686994.jpg?t=o&v=700>

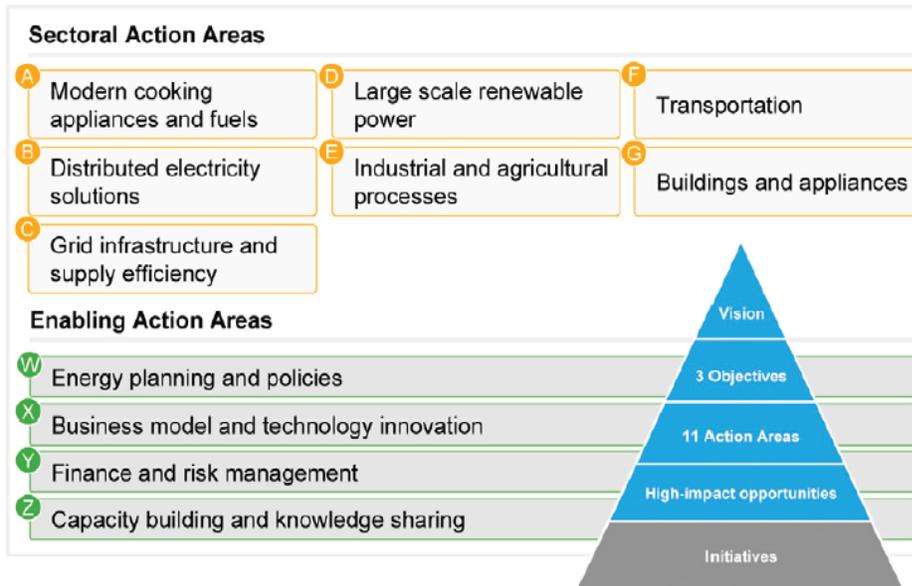


Gambar 4 Distribusi bahan bakar untuk memasak di Indonesia³

Indikator pencapaian dari inisiatif Sustainable Energy for All (SE4ALL) saat ini diadopsi oleh *Sustainable Development Goals* di goal yang ke-7. Inisiatif ini memiliki 3 target yang harus dipenuhi di tahun 2030: (1) memenuhi akses energi yang universal, dimana diperkirakan sekitar 1,13 milyar orang di seluruh dunia yang belum punya listrik. ; (2) menggandakan bauran energi terbarukan. Indonesia sendiri melalui rencana umum energi nasional yang saat ini sedang disusun, memiliki target komposisi energi terbarukan kebijakan energi nasional yaitu, 23% di tahun 2025 dan 25% di tahun 2030; (3) menggandakan laju perbaikan efisiensi energi. Saat ini intensitas energi Indonesia adalah 10 ton oil ekuivalen (toe), lebih dari 1 untuk perbandingan antara energi yang dikeluarkan dengan GDP yang dihasilkan. Indonesia mengharapkan agar angka tersebut bisa menjadi lebih kecil ke depannya.

³ Disampaikan oleh Fabby Tumiwa, "SE4ALL dan relevansinya terhadap advokasi energi di Indonesia", pada lokakarya yang diadakan oleh Kopernik dan IESR tanggal 7 September 2015

SE4ALL juga memiliki prioritas aksi, sebagaimana yang digambarkan di bawah ini:



Gambar 5 Prioritas aksi dari SE4ALL

Di dalam struktur SE4ALL sendiri ada yang namanya *high impact opportunity*. Indonesia disebutkan sebagai *high impact opportunity*, disebabkan karena Indonesia memiliki rasio elektrifikasi yang terbilang rendah dan masyarakat yang bergantung pada bahan bakar padat juga cukup tinggi. Sehingga, jika kedua isu di Indonesia ini diselesaikan, maka persentase target SE4ALL yang dicapai juga akan cukup tinggi. Ini yang disebut sebagai *high impact opportunity*. Dengan demikian, Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi dalam pencapaian target-target SE4ALL. Sayangnya, sudah 3 tahun berjalan, namun Indonesia masih belum siap dengan rencana aksi.

SE4ALL dirancang sebagai sebuah inisiatif yang sebenarnya lebih fleksibel ketimbang kesepakatan. Namun, fleksibilitas ini ditujukan agar inisiatif ini dapat membuat sebuah platform aksi dari berbagai aktor: pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil. Artinya, walaupun yang mengadopsi inisiatif adalah pemerintah, namun dalam pencapaiannya, tetap bisa dilakukan dari beberapa pemangku kepentingan lainnya. Itu sebabnya diperlukan *best practice*, yang terkait dengan inovasi, bisnis model, dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan aksi kolaboratif, dimana kita bisa saling belajar untuk dapat mereplikasi, karena tantangannya yang besar.

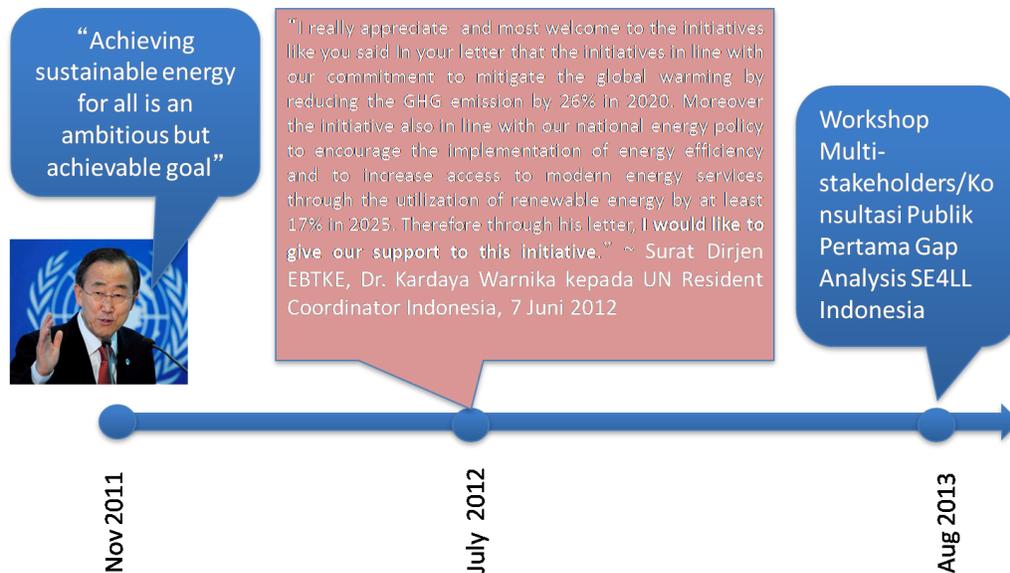
SE4All Country Action Process



Gambar 6 Proses SE4ALL di masing-masing negara

Gambar 6 merupakan tahapan-tahapan dari proses SE4ALL di tingkat nasional. Indonesia telah mengirimkan surat resmi kepada PBB mengenai kesediaannya untuk mendukung pencapaian target dari SE4ALL. Paska tahap tersebut, Indonesia harus menyusun *gap analysis* (analisa kesenjangan) yang proses penyusunannya sebenarnya sudah dimulai di tahun 2013. Pada tahap itu, IESR dan HIVOS memberikan asistensi pada kementerian ESDM dan UNDP untuk menyusun *gap analysis* ini. Rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut adalah rancangan awal untuk *gap analysis*. Walau demikian, hingga hari ini, Pemerintah belum menerima *gap analysis* yang telah dicoba untuk disusun. Seluruh pihak berharap untuk mengulangi prosesnya dengan masukan-masukan yang ada.

Tahap selanjutnya adalah menyusun rencana aksi dan program yang terkait. Beberapa usulan sebenarnya sudah pernah diajukan. Walau demikian, CSO tidak mungkin memutuskan segala sesuatunya sendiri; proses ini harus disepakati bersama-sama. Setelah rencana aksi dan program selesai, maka akan disahkan, lalu dilaksanakan. Namun, Indonesia saat ini terhenti di tahap *gap analysis*.



Gambar 7 Proses SE4ALL yang ada di Indonesia

2. Perkembangan Sustainable Energy for All di Internasional

Mengapa CSO harus terlibat dalam implementasi dari *Sustainable Energy for All* ini? Karena CSO merupakan aktor-aktor di lapangan, yang memang sehari-harinya mengetahui apa yang terjadi; seperti Kopernik, Ibeka, Greenpeace, dan yang lain. Kita punya pengalaman-pengalaman yang berguna yang bisa menjadi masukan untuk pemerintah bersama dengan UNDP, yang dapat dimasukkan ke dalam national implementation plan. Kita juga bisa membantu pemerintah dan swasta. Misalnya ada baiknya jika rencana implementasi tersebut ketika dilakukan di lapangan, tidak menyulitkan ibu-ibu, atau justru menambahkan beban baru. Hal ini yang harus kita pastikan. Kita juga merupakan aktor yang dapat memastikan akses energi yang bersih, aman dan berkelanjutan; dan keberlanjutan, seringkali merupakan aspek yang paling sering dilupakan.

Di akhir tahun 2014, diadakan survey mengenai keterlibatan CSO dalam proses SE4ALL di masing-masing negara⁴. Hasil survey menunjukkan bahwa ternyata CSO itu tidak mengetahui adanya informasi mengenai SE4ALL. Survey tersebut juga menunjukkan bahwa dalam perencanaan dan keikutsertaan, CSO tidak dilibatkan dalam konsultasi tersebut. Pemerintah dikatakan tidak memiliki upaya untuk melibatkan CSO, apalagi dalam penyusunan rencana aksi untuk implementasi SE4ALL. CSO juga merasa bahwa akses informasi publik yang ada tidak diketahui sumbernya darimana.

⁴ Survey dilakukan di Indonesia, Kenya, Nepal, Nicaragua, Nigeria dan Zimbabwe.

Survey SE4ALL di 6 Negara

	Indonesia	Kenya	Nepal	Nicaragua	Nigeria	Zimbabwe
Commitment by all actors to multi-stakeholder engagement and clear lead or focal point for the process	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green
Participatory and inclusive design of the consultation process	Red	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Yellow
Timely engagement with stakeholders	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Yellow
Access to meaningful information by the stakeholders	Red	Yellow	Yellow	Red	Red	Yellow
Gender awareness and proactive outreach to vulnerable and excluded groups	Yellow	Red	Red	Red	Red	Red
Capacity building of stakeholders so that they can provide informed input	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Red	Yellow
Clear action plans and clear division of roles and responsibilities	Red	Yellow	Yellow	Red	Red	Yellow
Participation of stakeholders in decision-making	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Red	Yellow
Participation in implementation and monitoring	Red	Yellow	Red	Red	Red	Yellow

Gambar 8 Hasil survey SE4ALL di 6 negara⁵

Peran kelompok masyarakat sipil lainnya adalah untuk mengkatalisasi aksi SE4ALL. Pernyataan ini berimplikasi pada arti bahwa sesama masyarakat sipil, harus dibangun kesadaran inisiatif SE4ALL antar sesama, karena selama ini kebanyakan pekerjaan CSO dilakukan secara terpisah. Program yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat sipil yang ada, pasti baik dan punya kontribusi dalam pencapaian SE4ALL. Namun apakah SE4ALL ada di dalam DNA program-program tersebut, itu yang harus kita ketahui bersama. Hal yang sama dengan upaya mengarusutamakan gender dalam akses energi serta membangun jejaring dan gerakan CSO di Indonesia, yang belum ada.

Pembelajaran dari proses di Nikaragua, contohnya, dimana lebih dari 40 CSO membentuk koalisi bernama Ranovables. Karena mereka terdiri dari banyak masyarakat sipil di Nikaragua, maka mereka kemudian berkembang menjadi gerakan, yang karena besarnya dilibatkan dalam penyusunan *national action plan* di Amerika Tengah.

Di Zimbabwe, HIVOS melakukan *roundtable meeting* antara HIVOS, donor dan juga parlementer. Di meeting ini bahas beberapa komponen SE4ALL. Upaya untuk memasukan isu gender ke dalamnya juga dimungkinkan. Zimbabwe memiliki aktivitas *look and learn*, dimana Zimbabwe mengirimkan delegasi *business council for sustainable development* Zimbabwe ke Korea dan Cina. Dari kegiatan tersebut,

⁵ Disampaikan oleh Sandra Winarsa, "Peran Masyarakat Sipil dalam Energi Berkelanjutan untuk Semua", di workshop Kopernik dan IESR tanggal 7 September 2015

mereka kemudian menyusun apa yang disebut sebagai *Green Industry initiative*, yang memberikan mereka masukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan efisiensi energi.

Pembelajaran yang dapat diambil dari Kenya adalah upaya mereka dalam mengangkat isu gender. Parlemerter perempuan di Kenya dilibatkan dalam diskusi-diskusi prioritas untuk SE4ALL di Kenya, serta mengangkat isu gender. Kegiatan ini dinilai sangat efektif karena mereka menilai masyarakat sipil tidak memiliki otoritas yang cukup untuk menjangkau pemerintah, apabila upaya-upaya ini dilakukan sendiri-sendiri. Pendekatan mereka pada Parlemen perempuan, yang memiliki otoritas sendiri, mampu untuk menyuarkan aspek gender ke dalam rencana aksi nasional.

Di Indonesia, keterlibatan partisipasi aktif CSO secara kontinyu juga dibangun oleh HIVOS, salah satunya melalui *Sumba Iconic Island (SII)*. Dimana komponen masyarakat sipil menjadi salah satu anggota dari kerangka institusi formal yang ada saat ini. Kerangka institusi formal tersebut terdiri dari 3 fungsi *taskforce*; yaitu kebijakan, implementasi, serta promosi dan akses pada pendanaan. Dengan menggunakan kesempatan tersebut, pelibatan CSO lokal dalam keanggotaan tersebut memungkinkan untuk mereka menyuarkan dengan aktif secara langsung kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kabupaten, terkait dengan hal-hal yang terjadi di lapangan.

Di tingkat internasional, terdapat koalisi yang bernama *Access - Alliance of CSOs for Clean Energy Access*. Access ini sebenarnya membangun koalisi yang diciptakan untuk mengadvokasi SE4ALL di tingkat internasional. Misi dari Access adalah: *advocate for people living in poverty to have access to safe, reliable and affordable energy, and for environmentally sustainable and efficient energy systems globally*.



Gambar 9 Anggota-anggota dari ACCESS - Alliance of CSOs for Clean Energy Access

Koalisi ini sangat rapih, karena sudah menyusun peta jalan di tingkat internasional, regional dan nasional. Khusus untuk nasional, adalah pekerjaan rumah dari CSO yang ada di nasional untuk melakukan advokasi di masing-masing negara.

Diharapkan dalam rangka SE4ALL ini, pemerintah, UNDP, komite SE4ALL, dan ADB khususnya - sebagai bagian dari bank pembangunan multilateral yang sudah memberikan komitmen pendanaannya untuk

SE4ALL - untuk memberikan komitmen publik dan melakukan proses multi-pihak secara inklusif serta menunjuk *lead focal point*.

3. Berbagai inisiatif yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil

Diskusi ini juga melihat berbagai macam inisiatif yang sebenarnya sudah dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil yang hadir. Kopernik misalnya, yang memiliki program bernama "Ibu Inspirasi". Program tersebut telah memungkinkan Kopernik untuk bekerja sama dengan 400 perempuan di daerah terpencil, dengan mendistribusikan lebih dari 10.000 teknologi tepat guna dengan mengurangi emisi sekitar 5000 ton CO₂.

Program Ibu Inspirasi mengajak ibu-ibu di daerah terpencil untuk berpartisipasi dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Kopernik guna memasarkan teknologi-teknologi Kopernik seperti lampu tenaga surya, kompor biomassa, dan saringan air. Mereka berperan seperti agen teknologi, yang memasarkan kepada masyarakat sekitarnya, mendapatkan keuntungan berupa pemasukan dari hasil memasarkan teknologi tersebut, sehingga akan menambah pemasukan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Program Ibu Inspirasi sudah diakui oleh UNFCCC tahun lalu, sebagai bagian dari *Momentum for Change*, untuk kategori *Women of the South*. Ibu Inspirasi memberikan pengalaman pemberdayaan (*empowerment*) *journey, marketing*, dengan menggunakan sistem konsinyasi, kios dan warung kecil. Dari sinilah mereka mendapatkan penghasilan.

Perempuan menjadi sasaran dari kegiatan ini, dikarenakan perempuan merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memasak dan juga kegiatan-kegiatan lain dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kenapa memilih perempuan karena, dari survey yang dilakukan oleh Kopernik, 90% pendapatan yang didapat oleh perempuan itu diberikan kepada keluarganya, 60% dilakukan untuk menambah gizi makan anak-anak, untuk ditabung, atau menyekolahkan anak. Ketika dibandingkan dengan bapak-bapak, ternyata yang diberikan hanya 60% penghasilan ke keluarganya.

Pengalaman implementasi 5 tahun dari program Ibu Inspirasi ini, membuktikan bahwa dengan pemberdayaan perempuan, dapat membuka energi akses kepada masyarakat di pulau-pulau terpencil. Itu sebabnya penting untuk mengarusutamakan perspektif gender ini ke dalam proses SE4ALL di Indonesia, dan juga pemangku kepentingan untuk pembangunan dan energi di Indonesia juga bisa sadar bahwa dengan memberikan akses kepada perempuan, pencapaian target SE4ALL dimungkinkan.

Untuk dapat mengarusutamakan perspektif gender di Indonesia, penting untuk membangun kemitraan antara kelompok masyarakat sipil. Penting juga untuk melibatkan institusi pemerintah, dalam rangka menghidupkan kembali proses SE4ALL.

IBEKA juga telah melakukan cukup banyak kegiatan terkait dengan mikrohidro dan juga biogas. Walau demikian pendokumentasian merupakan kelemahan yang sampai dengan saat ini belum bisa diatasi.

Yayasan Rumah Energi memiliki kegiatan biogas yang diharapkan dapat menyentuh *marketplace*. Namun untuk dapat mencapai 100 % *marketplace*, akan diperlukan aktor utama, serta pemasok dan juga sisi permintaan. Untuk pengembangan sampai dengan titik ini, maka isu pendanaan akan muncul. Jika isu ini dapat diatasi, maka untuk jenis energi terbarukan apa pun, akan bisa dilakukan. Penting untuk dapat memunculkan instrumen-instrumen pendanaan yang bisa digunakan di tataran masyarakat kecil, seperti *micro-finance*. Yayasan Rumah Energi menyatakan bahwa yang penting bukan hanya teknologi, tapi juga mekanisme pendanaan.

World Resource Institute (WRI) Indonesia menyatakan bahwa telah ada perangkat yang disusun untuk menilai apakah kemampuan pemerintah sudah mencukupi dalam menjalani visi dan misi yang ada di bidang energi. Melalui perangkat tersebut, pemerintah dapat mengetahui kebijakan-kebijakan seperti apa yang bisa mendukung dan lebih cocok untuk masing-masing negara.

WRI juga sedang menyusun peta terkait dengan masyarakat-masyarakat yang belum mendapatkan listrik, yang akan dilakukan dengan pendekatan spasial. Diharapkan dengan penyusunan peta ini, pemerintah bisa lebih mengetahui potensi-potensi, dan bisa juga memasukkannya dalam *gap analysis*.

PEKKA mengembangkan kegiatan ketahanan pangan dan energi. Titik masuk yang digunakan adalah pengembangan lembaga keuangan mikro yang menjadi basis. Perlu juga didorong bagaimana masyarakat komunitas melalui kelompok ini bisa mendorong isu energi. Terutama karena terkait dengan diterbitkannya Undang-Undang Desa. PEKKA saat ini sedang mengembangkan, *champion-champion* di lapangan, mengembangkan potensi yang ada di lokal, serta bagaimana bisa mendorong inisiatif-inisiatif lokal untuk bisa masuk dalam rencana pembangunan desa. Adanya Undang-Undang Desa akan memicu alokasi pendanaan. Itu sebabnya, PEKKA juga mengajak masyarakat untuk memahami RPJMN dan RPJMDes.

4. Tindak lanjut implementasi SE4ALL oleh kelompok masyarakat sipil

Pertemuan antar CSO ini menghasilkan beberapa hal berikut untuk ditindaklanjuti:

1. Seluruh CSO yang berkumpul mendukung adanya keterlibatan CSO dalam proses SE4ALL di Indonesia
2. Disepakati bahwa akan ada pertemuan reguler antar CSO terkait dengan proses SE4ALL, yang tujuannya adalah dalam format yang berbeda, misalnya dalam format knowledge sharing atau capacity building. Misalnya, ada yang belum paham mengenai bagaimana mengarusutamakan gender dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sehingga dari kelompok masyarakat sipil yang memiliki keahlian di bidang gender, dapat berbagi mengenai isu tersebut.
3. Terkait dengan *focal point* untuk CSO: di tahun 2012, pada pertemuan yang dilakukan IESR dengan 30 CSO, IESR ditunjuk untuk menjadi *focal point* untuk melakukan koordinasi. Tapi, mungkin dalam pertemuan yang akan datang, bisa ditentukan lagi siapa yang akan menjadi *focal point*. Sampai ada keputusan berikutnya, IESR akan tetap menjadi *focal point*.

4. Kopernik dan IESR merencanakan untuk melakukan *strategic planning* untuk CSO, yang waktu dan tempatnya akan dikoordinasikan dengan CSO yang lain. Kemungkinan besar, *strategic planning* ini akan dilakukan di bulan Oktober 2015.